

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode pasca proklamasi kemerdekaan menjadi periode yang sulit bagi Indonesia. Dimana Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi yang harus dibenahi.¹ Berbagai masalah yang ada sepertinya menjadi ujian awal bagi Indonesia, mengingat statusnya yang sudah menjadi negara merdeka. Namun, prospek lebih lanjut pasca proklamasi kemerdekaan menjadi tujuan yang lebih penting untuk menuntun negara menuju masa depannya. Usaha untuk menentukan masa depan Indonesia tidak hanya muncul dari para pemimpin negeri, sikap rakyat untuk ikut dalam menentukan arah akan dibawa kemana masa depan Indonesia pun sangat tinggi. Maka tidak dapat dipungkiri perdebatan dan perbedaan pendapat yang akhirnya muncul di hampir semua kalangan. Hal ini terlihat dalam perdebatan tentang ideologi negara, meningkatnya kekuatan komunis, ketidakefektifan pemerintah pusat dalam menangani masalah daerah, dan perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta. Kondisi itu telah menyebabkan munculnya pergolakan daerah berupa peristiwa PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi,² menjadi sederetan masalah internal yang dihadapi Indonesia sekaligus menandai adanya revolusi.

¹ Lihat M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 356.

² Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. xiv.

Selain itu kehadiran Belanda yang masih saja tidak mau melepaskan Indonesia secara utuh, dan masih ingin terus menguasai sebagian besar ekonomi dan kehidupan bangsa Indonesia³ melahirkan sikap sentimen yang serius di kalangan masyarakat, dan sebagian kalangan birokrat yang radikal.⁴ Mereka menginginkan agar Belanda tidak menguasai kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia. Pemerintah juga diminta untuk melakukan tindakan yang aktif dalam meredam kepentingan pihak Belanda. Maka tidak heran jika sikap ini berkembang di berbagai kota besar, seperti Surabaya dan menjadi sikap sentimen anti Belanda yang muncul di kota ini.

Paling tidak dapat dikatakan ada dua pokok permasalahan yang menjadi penting dalam munculnya sikap sentimen terhadap Belanda di Surabaya. Pertama, melihat kembali dari tahun 1945 dimana Belanda kembali menguasai Kota Surabaya setelah pasukan sekutu (Inggris) ditarik dari Surabaya.⁵ Kedua,

³ Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hlm. 107.

⁴ Sebenarnya dalam periode ini, khususnya dalam permasalahan mengenai kebijakan ekonomi terdapat dua pihak yang saling berselisih pendapat. Dua pihak itu adalah apa yang biasa disebut dengan kelompok moderat dan kelompok radikal. Perbedaan antara kelompok moderat dan kelompok radikal ini tercermin dalam pertentangan mengenai kebijakan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan peranan perusahaan-perusahaan swasta dan asing. Kelompok moderat dapat menyetujui kegiatan perusahaan-perusahaan itu dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis dan ideologis, sementara kelompok radikal menghendaki perubahan struktural yang mendasar dalam perekonomian. Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 22-23.

⁵ Sebenarnya masyarakat Surabaya sudah menaruh curiga tentang misi pasukan sekutu yang terbukti benar. Pasukan Belanda segera menguasai kota setelah pasukan sekutu ditarik dari Surabaya. Mereka membentuk pemerintahan darurat yang diberi nama *Kantoor voor Bevolkingszaken Soerabaya*. Dari namanya, lembaga tersebut hanya bertugas mengurus penduduk selama masa perang, terutama penduduk Eropa. Secara perlahan kota berhasil dikendalikan kembali. Para pengungsi kota setelah dua sampai tiga tahun berada di pengungsian. Penduduk Eropa yang semula berada pada tahanan Jepang juga sudah dilepas dan mereka yang lari ke luar negeri perlahan mulai kembali ke Surabaya. Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an* (Tangerang: CV Marjin Kiri, 2013), hlm 44-45.

permasalahan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dianggap tidak menguntungkan bangsa Indonesia.⁶ Dua pokok permasalahan ini menjadi alasan mengapa sikap sentimen terhadap Belanda semakin besar di Surabaya.

Dari permasalahan yang pertama, tahun 1946 Surabaya menjadi salah satu kota yang kembali dikuasai oleh Belanda memang terlihat wajar. Berbicara mengenai hubungan antara Surabaya dan orang-orang Eropa pada masa kolonial tentu mempunyai banyak pertautan. Surabaya memiliki sejarah yang kuat dengan statusnya yang dulu sebagai kota penting pada masa kolonial. Kota ini memegang peranan penting dalam berbagai aspek khususnya ekonomi dan pemerintahan. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi yang penting, Surabaya telah menarik minat orang-orang Eropa untuk tinggal di kota ini. Keberadaan mereka juga turut mempengaruhi kemajuan Surabaya.⁷ Bukan hanya orang-orang Eropa saja, abad 20 menjadikan Surabaya sebagai kota tujuan dari banyak komunitas.⁸ Terbukti, Surabaya menjadi kota yang dihuni oleh beragam komunitas, seperti Eropa, Cina, Arab, dan Bumiputera.

Selain itu, Surabaya sendiri menjadi salah satu kota pesisir Jawa terpenting selain Batavia dan Semarang sebagai kota-kota modern yang penting

⁶ Hasil dalam konferensi itu menyimpulkan bahwa Belanda masih tetap mempertahankan kedaulatan Irian Jaya sampai ada perundingan-perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah itu. RIS (Republik Indonesia Serikat) yang merupakan bentukan Belanda untuk Indonesia memikul tanggung jawab atas hutang Hindia-Belanda sebesar 4,3 milyar *gulden*. Mengutip M.C Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 350.

⁷ Purnwan Basundoro, *op. cit.*, hlm. 28.

⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan kata “komunitas” bukan “etnis”, dan kata komunitas ini digunakan untuk menyebut komunitas Eropa, Cina, Arab, maupun Bumiputera.

bagi Hindia-Belanda.⁹ Adanya pelabuhan besar yang mumpuni, membuat aktivitas perdagangan di Surabaya semakin dinamis dan sangat menguntungkan bagi pihak kolonial Belanda. Disamping menjadi kota pelabuhan yang penting, Surabaya juga sebagai basis kota militer dan gudang makanan.¹⁰ Memiliki peranan yang begitu penting dan menguntungkan ini, tidak mengherankan jika orang-orang Belanda sangat ingin menguasai dan datang kembali meskipun Indonesia sudah memproklamkan kemerdekaannya, sehingga masyarakat Surabaya sendiri pun merasa geram dan menyimpan sikap sentimen terhadap orang-orang Belanda.

Permasalahan itu seakan berkelanjutan dengan munculnya permasalahan kedua yang semakin membuat sikap sentimen masyarakat Surabaya menjadi sikap anti terhadap Belanda. Hasil KMB yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia menjadi pangkal permasalahan. Banyak sekali putusan yang dianggap merugikan Indonesia. Salah satunya masalah Irian Barat yang menjadi ganjalan utama dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda. Dimana KMB yang diadakan di Den Haag, tidak menyertakan Irian Barat dalam kesepakatan wilayah kedaulatan yang diserahkan oleh Belanda, dan baru diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun berikutnya dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan

⁹ Ikhsan Rosyid, "Industri Mesin Surabaya: Fungsi dan Peran dalam Industrialisasi dan Pembangunan Kota Abad XIX dan Awal Abad XX," dalam Purnawan Basundoro dkk, *Tempo Doloe Selaloe Aktoeal* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007), hlm. 265.

¹⁰ Lihat Sarkawi B. Husein, *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan, Surabaya 1930-1960* (Jakarta: LIPI Press, 2010), hlm. 17.

Kerajaan Nederland.¹¹ Ini terlihat jelas bahwa Belanda masih banyak membutuhkan wilayah *Nieu-Guinea* (“Irian Barat”/ Irija) untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Beberapa pihak Belanda menyatakan bahwa *Nieu-Guinea* adalah *the last pillar* yang harus dipertahankan dan sekaligus menghangatkan perdebatan dalam KMB.¹²

Beranjak dari masalah itu, banyak sekali wacana yang muncul di tahun 1950-an atau pasca KMB untuk keluar dari dominasi Belanda. Banyak pihak yang menyuarakan nasionalisme untuk menjadi pegangan atau senjata dalam menyuarakan, bertindak bahkan mempengaruhi yang lain untuk melakukan “perlawanan” terhadap Belanda. Mulai dari adanya keinginan untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional sampai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing,¹³ bisa dikatakan menjadi hasil dari lahirnya sikap sentimen. Kondisi yang serupa pun menghinggapi sebagian besar masyarakat Surabaya. Pasca KMB perasaan sebagian masyarakat Surabaya menjadi sangat sensitif jika disinggung segala hal yang berkaitan dengan orang Eropa (Belanda). Bahkan hal-hal yang sepele pun bisa membangkitkan sentimen anti Belanda.¹⁴

Keadaan yang demikian ini menunjukkan suatu bentuk representasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap apa yang telah terjadi dengan pemerintah

¹¹ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 331. Mengutip Notosutardjo, *Dokumen Konperensi Medja Bundar*, hlm. 69.

¹² Suwarno Basuki, *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950* (Jakarta: T.P, 1999), hlm. 399.

¹³ Lihat Bondan Kanumoyoso, *op. cit.*,

¹⁴ Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota*, *op. cit.*, hlm. 46.

Indonesia dan Belanda, khususnya dalam jalur KMB. Masyarakat mulai bertambah sensitif saat mengetahui Indonesia semakin dirugikan dalam KMB, sedangkan sebelumnya masyarakat sudah menaruh sikap yang sinis pada orang-orang Belanda yang masih saja kembali dan ada di Surabaya. Padahal Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Maka sikap anti-Belanda menjadi pilihan untuk melawan apa saja yang masih berbau Belanda di Surabaya. Tidak pelak sikap yang demikian mendorong adanya suatu gerakan anti Belanda, yang bukan hanya terfokus pada pergolakan fisik, melainkan juga merambah berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan pendidikan peninggalan Belanda.

Meskipun demikian, dengan adanya sikap yang seperti itu dapat dikatakan memberikan dampak yang penting di berbagai sisi, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun pendidikan pada masyarakat Surabaya. Demikian pula dengan cara pandang dalam melihat adanya suatu kepentingan gerakan yang dilandasi rasa nasionalisme. Bukan tidak mungkin terselubung suatu kepentingan baru untuk dapat menguasai maupun mempengaruhi dengan beralatkan wacana mengenai isu nasionalisme.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk gerakan anti Belanda di Surabaya tahun 1950-1960?

2. Bagaimana dampak dari adanya gerakan anti Belanda di Surabaya tahun 1950-1960?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Secara lingkup spasial penelitian ini ditujukan pada Kota Surabaya. Alasan mengapa Surabaya menjadi pilihan dalam penelitian karena dalam gerakan anti Belanda yang ada di Surabaya dilakukan atau dimobilisasi dari berbagai kelompok masyarakat yang ada, seperti buruh, pelajar, partai, dan lain sebagainya. Selain itu gerakan yang terjadi di Kota Surabaya ini juga dapat dikatakan memberikan dampak yang luas di berbagai bidang yang ada, seperti sosial, budaya maupun pendidikan. Alasan ini juga dapat dihubungkan dengan pentingnya peranan kota Surabaya pada masa kolonial membuat kota sangat identik dengan dominasi orang-orang Belanda sehingga masih banyak hal yang berbau Belanda.

Sementara secara temporal, penelitian ini mengambil rentang tahun 1950-1960. Memulai tahun 1950 sebagai awal dari penelitian didasarkan pada munculnya sikap sentiment pasca KMB yang dianggap merugikan Indonesia. Disamping itu, bermula pada tahun 1950 didasarkan pada kondisi masyarakat Surabaya yang rawan dengan pertentangan sosial. Kondisi masyarakat itu terlihat dari isi surat Gubernur Jawa Timur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Dimana kondisi masyarakat Surabaya di awal tahun 1950 mengalami kekacauan akibat dari latar belakang kedatangan kembali orang-orang Belanda dan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Surabaya pasca

revolusi fisik.¹⁵ Sedangkan tahun 1960 sebagai batasan akhir dalam penelitian ini semata-mata ingin melihat reaksi pasca tahun 1957 sebagai puncak dari adanya nasionalisasi, serta sudah mulai berkurangnya orang-orang Belanda di Surabaya diawal tahun 1960-an.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk gerakan anti Belanda di Surabaya.
2. Untuk menjelaskan dampak apa saja yang terjadi dari adanya gerakan anti Belanda di Surabaya.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dari adanya penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa apa yang dinamakan gerakan itu tidak semuanya berbentuk fisik, namun juga bisa dilakukan dalam bentuk lain.
2. Menambah suatu referensi yang mempunyai guna bagi perkembangan historiografi, khususnya dalam hal sejarah lokal di Surabaya.

¹⁵ ANRI, *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia no 81*, Surat dari Gubernur Jawa Timur no. Cx 3/3/1950, tanggal 1 Juni 1950.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meninjau beberapa buku untuk dijadikan pembanding. Diantaranya buku *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*¹⁶ yang ditulis oleh Bondan Kanumoyoso. Buku ini secara garis besar menjelaskan proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang tumbuh dari adanya keinginan untuk membangun perekonomian bangsa yang masih jauh dari stabil. Munculnya keinginan itu didukung dengan semakin buruknya hubungan antara Indonesia dengan Belanda pasca ditetapkannya KMB. Namun buku ini tidak menjelaskan adanya gerakan anti Belanda yang ada di Surabaya dan lebih difokuskan pada perkembangan perekonomian Indonesia yang nantinya ditandai dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, meskipun ada suatu akibat yang disebabkan dari permasalahan yang sama.

Buku *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*¹⁷ dari William H. Frederick menjadi tinjauan selanjutnya dalam melihat kelokalan Surabaya khususnya di periode proklamasi dan revolusi fisik. Secara garis besar buku ini menjelaskan mengenai keadaan masyarakat Surabaya pada masa kolonial sampai pasca kemerdekaan di tahun 1946. Adanya sikap sentimen dari masyarakat Surabaya terhadap orang-orang Belanda juga masuk dalam pembahasan buku ini, khususnya sentimen yang

¹⁶ Bondan Kanumoyoso, *op. cit.*,

¹⁷ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia, Surabaya 1926-1946* (Jakarta: PT Gramedia, 1989).

muncul pasca proklamasi kemerdekaan. Sentimen ini memang menjadi permasalahan yang berlanjut dan menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian gerakan anti Belanda di Surabaya. Namun dalam penelitian mengenai gerakan anti Belanda di Surabaya tidak hanya melihat permasalahan sentimen masyarakat muncul akibat kembalinya orang-orang Belanda ke Surabaya. Tetapi juga permasalahan lain yang terjadi di periode 1950. Pembahasan dalam buku tersebut tentunya menjadi salah satu pembeda dan pendukung dalam munculnya gerakan anti Belanda.

Buku *Seratus Hari di Surabaya yang Menggeparkan Indonesia*¹⁸ dari Roeslan Abdulgani menjadi tinjauan untuk melihat keadaan kota Surabaya di periode pasca kemerdekaan. Buku ini menjadi tinjauan karena didalamnya membahas tentang kondisi masyarakat Surabaya dalam masa peperangan fisik. Adanya sikap masyarakat Surabaya yang mengalami pergolakan dengan orang-orang Belanda yang dapat menjadi tinjauan dalam penelitian ini. Namun dalam buku tersebut lebih menekankan pergolakan yang mengarah pada revolusi fisik yang terjadi di bulan Nopember 1945. Sikap anti Belanda dari masyarakat yang muncul karena menolak kembalinya kolonialisme pasca kemerdekaan.

Buku *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang*¹⁹ karya dari Purnawan Basundoro juga masuk dalam tinjauan. Dalam buku ini menjelaskan perkembangan dua kota (Surabaya dan Malang), khususnya Surabaya sejak kolonial sampai kemerdekaan. Pembahasan yang secara lokal mengenai Surabaya

¹⁸ Roeslan Abdulgani, *Seratus Hari di Surabaya yang Menggeparkan Indonesia* (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset).

¹⁹ Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman., op. cit.,*

juga ditunjukkan dalam adanya bab tentang usaha menuju listrik nasional yang masih mempunyai kolerasi dengan penelitian ini. Namun pembahasan mengenai gerakan anti Belanda sendiri tidak disinggung dalam buku ini. Meskipun ada pembahasan mengenai suatu gerakan tapi lebih terfokus pada gerakan protes mengenai tanah partikelir yang ada di Surabaya.

Dalam konteks Surabaya, *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Symbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*,²⁰ karya dari Sarkawi B. Husain merupakan tinjauan selanjutnya dalam memahami sisa-sisa kolonial Belanda. Buku ini menjelaskan adanya sisa-sisa kolonial yang ada pada monument, tugu, patung, dan nama-nama jalan di Surabaya. Pemerintah kolonial pada masa itu menjadikan komponen-komponen itu menjadi suatu simbol representasi dari politik kekuasaannya. Simbol itu mulai mengalami pergeseran dengan mulai dihilangkannya simbol-simbol tersebut, seperti pada nama-nama jalan yang mulai diganti. Hal ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menghapuskan sisa-sisa kolonial Belanda di periode 1930-1960. Dimana periodisasi yang digunakan tentunya masih berkolerasi dengan penelitian gerakan anti Belanda di Surabaya. Namun buku ini tidak menyinggung adanya sikap sentimen terhadap Belanda dan memunculkan adanya gerakan anti Belanda.

Dari beberapa tinjauan buku, belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai gerakan anti Belanda di Surabaya. Penelitian yang ada masih cenderung pada konteks yang luas dan tidak melihat pada persoalan kelokalan yang terjadi. Persoalan inilah yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut dalam penelitian

²⁰ Sarkawi B. Husein, *op. cit.*,

terhadap gerakan anti Belanda di Surabaya sebagai salah satu bentuk adanya politik tingkat lokal.

F. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori

Tema sejarah lokal bisa dikaitkan dengan jenis penelitian ini. Namun sejarah lokal sendiri mempunyai lingkup yang lebih luas mengenai pembahasan peristiwa yang terjadi di tingkat lokal, dan tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari aspek lain yang menjadikan pemicu dari adanya peristiwa di tingkat nasional.²¹ Aspek lain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya aspek politik yang menjadi komponen utama dalam adanya peristiwa lokal itu sendiri yang dalam hal ini melahirkan sebuah gerakan anti terhadap Belanda, sehingga menjadikan penelitian ini juga memiliki genre sebagai sejarah politik.

Namun dalam melihat peristiwa yang dapat digolongkan dalam sejarah politik, tentunya akan lebih kompleks jika menggunakan apa yang telah dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo yaitu pendekatan multidimensional. Pendekatan ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat ditampilkan secara bulat yang dilihat dari sudut pandang aspek lain yang mempengaruhi, baik dari segi faktor maupun dampaknya.²²

Digunakannya pendekatan multidimensional, tentunya membuat penelitian ini tidak lepas dari adanya keterkaitan dari berbagai aspek maupun bidang lain

²¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana), hlm. 185.

²² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 166.

yang menjadi faktor maupun dampak dari adanya gerakan anti Belanda di Surabaya. Sebab dalam suatu pergerakan, bukan hanya terbatas pada bidang politik tetapi juga meliputi bidang ekonomi, sosial, dan kultural sebagai salah satu sifat yang universal dan mempunyai aspek multidimensional.²³

Untuk menjelaskan berbagai peristiwa tertentu dalam gerakan anti Belanda, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan teori yang mendukung. Dalam memakai istilah *anti* tentunya mempunyai makna yang beragam, untuk itu perlu untuk dijelaskan makna yang digunakan dalam memahami istilah *anti* dalam penelitian ini. Jika melihat makna istilah *anti* dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, maka *anti* mempunyai makna *melawan; menentang; memusuhi*. Jadi *anti* merupakan suatu bentuk perlawanan, yang jika dimaksudkan dalam penelitian ini dapat diambil tafsiran perlawanan terhadap Belanda. Sedangkan kata Belanda sendiri merujuk pada objek yang berhubungan dengan Belanda, seperti orang-orang Belanda, perusahaan-perusahaan milik Belanda, gedung-gedung milik orang Belanda, termasuk segala kebijakan yang pernah diterapkan oleh Belanda saat menguasai Surabaya.

Dalam memahami gerakan anti Belanda sendiri dapat dikatakan merujuk pada sebuah landasan mengenai konsep dan teori tentang gerakan sosial-politik. Seperti yang dikemukakan oleh Oberschall (1993) yang dikutip oleh McAdam (2004) bahwa ada empat dimensi yang perlu diperhatikan dalam setiap upaya untuk memahami suatu gerakan sosial, (1) berkembangnya ketidak puasan

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 231.

dan/atau kekecewaan sosial; (2) gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan dan ideologi-ideologi dibingkai untuk mengkritisi berbagai institusi dan para pemimpin; (3) kemampuan untuk melakukan tindakan secara kolektif atau mobilisasi lawan; (4) kesempatan politik.²⁴ Dari empat dimensi yang ada menunjukkan munculnya sebuah gerakan sosial bukan hanya murni dari masalah sosial yang ada, melainkan aspek lain seperti politik, budaya, keyakinan dan lain sebagainya menjadi bagiannya.

Pendapat dari Diani dan Bison dapat dijadikan rujukan dalam memahami gerakan sosial. Menurutnya gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu.²⁵ Dalam teori psikologi, menyebutkan bahwa ketidakpuasan (*discontent*) merupakan salah satu akar dari gerakan sosial, atau biasa disebut sebagai teori ketidakpuasan (*discontent theory*).²⁶ Ketidakpuasan yang dialami tentunya menyulutkan rasa untuk menentang maupun melawan, seperti halnya ketidakpuasan yang diakibatkan dari ketidakadilan dalam suatu ranah politik, yang juga menyebabkan gerakan politik. Karena gerakan politik sendiri adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik.²⁷ Keadaan politik yang ada mampu

²⁴ Soenyono, *Teori-teori Gerakan Sosial* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2005), hlm. 7.

²⁵ Darmawan Triwibowo, "Menakar Signifikansi Aktivisme Civil Society bagi Demokratisasi," dalam *Gerakan Sosial : Wahana Sipil Society bagi Demokratisasi* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 5. Mengutip pendapat M. Diani dan I Bison, *Organisations, coalitions, and movements. Dipartimento di sociologia e Ricerca Sociae* (Universita di Trento, 2004), hlm. 4.

²⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 228.

²⁷ Rizca Yunike Putri, *Gerakan Sosial Politik Omah Tani di Kabupaten Batang*. Skripsi mahasiswa Departemen Ilmu Politik Unair, 2011/2012, hlm 12.

menggerakkan adanya gerakan sosial-politik seperti yang ada pada teori ketidakpuasan.

Dalam teori S-R (*Stimulus-Respon*) gerakan politik yang melibatkan massa, atau sosial sebetulnya merupakan gejala psikologis massa dalam komunikasi yang sporadik, karena adanya suatu rangsangan (*stimuli*) serta pesan yang telah tersampaikan atau diterima oleh sekelompok orang karena adanya respon atau tanggapan.²⁸ Respon yang diterima bisa juga berasal dari sebuah keinginan yang sama sebagai salah satu komponen munculnya sebuah gerakan.

Begitu pun dengan gerakan anti Belanda yang berwujud dalam gerakan sosial. Dimana sikap anti yang ada muncul dari ketidakpuasan dalam ranah politik yang dapat mempengaruhi aspek lain. Sikap memusuhi, menentang, atau melawan merupakan wujud representasi dari keadaan yang tidak menguntungkan. Kongkritnya keputusan politik dalam KMB yang merugikan dan masih adanya orang-orang Belanda di Surabaya membuat sikap itu tersulutkan. Ditambah dengan adanya pengaruh dan kepentingan dari pihak lain dalam memanfaatkan situasi yang ada.

Gerakan anti Belanda di Surabaya ini tentunya juga tidak akan mencuak jika tidak mendapatkan pengaruh dari kelompok maupun pihak lain. Karena dalam ilmu politik sendiri fungsi pengaruh sangatlah penting dalam memobilisasi massa, Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Norman Barry yang menyatakan bahwa pengaruh merupakan suatu tipe kekuasaan, dimana seseorang yang

²⁸ *Ibid.*,

dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.²⁹

Fungsi pengaruh dapat berjalan maupun dijalankan sebab adanya suatu rasa ketidakpuasan (*discontent*) yang dialami oleh orang atau sekelompok orang yang dalam konteks ini mengarah dengan adanya keputusan yang dianggap merugikan. Pada saat ketidakpuasan sedang dialami seseorang maka pengaruh yang dianggap positif dari adanya permasalahan nasional menjadi rujukan. Bisa dikatakan masalah nasional yang ada menjadi salah satu kesempatan yang terbungkus dalam kepentingan dari suatu kelompok maupun pihak lain, sehingga terlihat positif dengan semangat nasionalismenya dan akan terlihat negatif karena terdapat kepentingan suatu kelompok dan bisa dikatakan sebagai bagian dari cara politik.

Dalam teori ilmu politik sendiri dikenal adanya bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kebijakan-kebijakan (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.³⁰ Beranjak dari teori ini maka nantinya akan dapat dilihat suatu hasil yang akan dicapai dari tujuan politik yang dilakukan.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, edisi revisi* (Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka, 2008), hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

Penelitian tentang *Gerakan Anti Belanda di Surabaya 1950-1960* tentunya ingin menjelaskan secara kronologis adanya gerakan politik tingkat lokal di Surabaya dalam usaha untuk melihat persoalan yang terjadi di tingkat lokal dengan adanya persoalan nasional. Maka dengan menggunakan beberapa konsep yang telah disinggung diatas, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis data yang kualitatif dengan mengkolaborasikan sumber-sumber yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penulisan sejarah merupakan sarana bagi para sejarawan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Karena metode merupakan salah satu ciri dari cara kerja ilmiah yang penting dalam melakukan suatu penelitian, khususnya sejarah. Dalam cara kerjanya terdapat empat tahapan dalam melakukan metode sejarah.³¹ Empat tahapan ini sekaligus menjadi kaidah-kaidah yang disepakati secara umum dalam usaha untuk melakukan penulisan sejarah. Berikut ini adalah empat tahap penulisan sebagai bentuk metode penelitian skripsi yang penulis lakukan.

Pada tahap awal, penulis mengumpulkan data-data yang akan digunakan sebagai sumber penulisan atau yang biasa disebut sebagai *heuristik* yaitu kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah.³² Kegiatan menghimpun sumber data ini dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

³¹ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 28-29.

³² *Ibid.*, hlm. 28.

Kegiatan menghimpun sumber primer yang berupa dokumen dan arsip seperti arsip Lembaran Negara Republik Indonesia yang penulis dapatkan di perpustakaan Arsip BAPPEDA, perpustakaan kota Surabaya dan perpustakaan Medayu Agung (Pak Oei). Sedangkan untuk sumber yang berupa surat kabar dan artikel sejaman penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jogja Library, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya-Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS), dan beberapa pinjaman dari arsip koleksi pribadi, surat kabar yang ada seperti *Soerabaja Post*, *Harian Umum*, *Java Post*, *Pewartu Soerabaja*. Sementara untuk sumber sekunder, penulis mendapatkannya melalui Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Perpustakaan pusat Universitas Airlangga, Perpustakaan Medayuh Agung, dan beberapa pinjaman dari buku koleksi pribadi.

Ditinjau dari segi bentuk informasi sejarah selain yang berasal dari tulisan, adapula yang dalam bentuk lisan yakni sumber yang mengacu pada pengisahan (*testimony*) orang lain (narasumber baik yang hadir maupun tidak ketika peristiwa itu berlangsung). Sumber lisan yang seperti ini dipahami sebagai sumber primer. Sementara untuk pengulangan penceritaan yang diperoleh dari turunan sumber lisan hingga kesekian turunan yang berikutnya, disebut dengan sumber sekunder,³³ atau tradisi lisan (*oral tradition*). Mengingat masih sangat pentingnya sumber lisan dalam mendukung suatu penelitian, maka penulis juga akan

³³ Arya Wanda Wirayuda, *Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform: Studi Konflik penguasaan Tanah di Surabaya Tahun 1959-1967*, Skripsi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Unair, 2008, hlm. 24. Mengutip Pendapat Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), hlm. 35.

menggunakan sumber ini sebagai pendukung daripada penelitian ini dengan melakukan wawancara. Wawancara tersebut akan penulis lakukan kepada narasumber yang pernah terlibat atau mengetahui adanya gerakan anti Belanda pada tahun tersebut.

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik terhadap sumber atau *verifikasi* untuk mengetahui benar-tidaknya, serta asli dan tidaknya sumber-sumber tersebut. Tahap ini terdiri dari dua macam, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengenai kredibilitas dari sumber sejarah tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber dari surat kabar Harian Umum, Java Post, Pewartu Soerabaya untuk dilakukan kritik terhadap isinya. Sedangkan kritik eksternal mengkritik tentang keotentikan suatu sumber, apakah sumber tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang namanya tertera dalam sumber tersebut atau tidak. Kritik ini sangat diperlukan untuk meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya. Dalam tahap ini penulis mencoba membandingkan antara sumber primer seperti yang ditemukan pada surat kabar yang ada dengan buku-buku yang masih mempunyai kolerasi masalah yang sama.

Tahap ketiga selanjutnya adalah *interpretasi*, yaitu menetapkan makna dan saling keterkaitan hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi. Dalam tahap ini penulis mengidentifikasi dari setiap fakta-fakta yang sudah ada untuk dihubungkan dengan sumber-sumber sekunder yang mempunyai keterkaitan. Fakta-fakta yang diperoleh dari sumber surat kabar yang ada sebelumnya coba

penulis kaitkan keterkaitan yang ada dengan buku-buku atau literature yang sudah ada seperti tulisan dari Bondan Kanumoyoso, Ricklef, dan Purnawan Basundoro.

Dari ketiga tahap yang ada sebelumnya tentunya menjadi suatu tahapan yang harus dilakukan dengan runtut dan aplikatif, sehingga tahap yang terakhir yaitu *historiografi* menjadi tahap akhir yang akan menghasilkan penulisan sejarah yang baru dan komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi dalam empat bab. Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, memaparkan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang ada di kota Surabaya. Menjelaskan keadaan politik yang terjadi ditingkat nasional kemudian dikomparasikan dengan kondisi politik di tingkat lokal yang ditandai dengan adanya dominasi kemenangan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di Surabaya.

Bab III, menjelaskan gerakan anti Belanda, mengidentifikasi kelompok yang berperan atau mempunyai pengaruh terhadap adanya gerakan anti Belanda, sasaran dan dampak dari adanya gerakan anti Belanda terhadap keberadaan orang-orang Belanda.

Bab IV, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian atau rekonstruksi sejarah yang dilakukan. Kesimpulan ini

berupa jawaban mengenai hasil dari penelitian. Dimana kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian sehingga menghasilkan tulisan yang baru dan memberikan pengetahuan yang berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya.

